

BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini akan dirumuskan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Rumusan tersebut merupakan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diajukan sebelumnya mengenai konflik yang terjadi antara Tentara Indonesia dan MPPP (Majelis persatuan Perjuangan Priangan) di Jawa Barat. Adapun beberapa hal pokok yang dapat peneliti simpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pembentukan dua kekuatan bersenjata pada awal revolusi kemerdekaan, yaitu Tentara Indonesia dan laskar-laskar perjuangan, timbul atas kondisi yang mendesak untuk segera dibentuk badan pertahanan dan keamanan guna mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Pihak sipil, yang banyak dimotori oleh tokoh pemuda berinisiatif membantu perjuangan pemerintah dengan membentuk berbagai macam badan-badan perjuangan di daerah-daerah, termasuk bermunculannya badan-badan perjuangan di wilayah Jawa Barat. Maka munculah badan-badan perjuangan yang dipengaruhi oleh ideologi kepartaian dan politik, misalnya Hisbullah, Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pesindo dan lain-lain. Khususnya di Jawa Barat, kebanyakan badan-badan perjuangan itu kemudian menggabungkan diri kedalam MPPP (Majelis Persatuan Perjuangan Priangan).

Kedua, antara Tentara Indonesia dan MPPP ternyata mengalami dualisme dalam memberikan komando menghadapi Sekutu. Hal ini dikarenakan telah dibentuknya lembaga yang bernama Biro Perjuangan dan dikukuhkannya Dewan

Penasehat Pimpinan Tentara. Dualisme komando yang dimaksud adalah Markas Besar yang membawahi Tentara Indonesia dan Kementerian Pertahanan (Dimana Menteri Pertahanan ketika itu adalah Amir Sjarifuddin) yang membawahi badan-badan perjuangan/MPPP. Akibatnya, untuk mengkoordinir kedua kekuatan tersebut sering terjadi persaingan. Tentara Indonesia yang lebih mengikuti komando dari Markas Besar, dan MPPP yang lebih mengikuti komando dari Kementerian Pertahanan.

Ketiga, konflik antara Tentara Indonesia dan MPPP disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) karena kekurangan akan senjata sehingga kedua belah pihak saling memperebutkannya, 2) tentara dan laskar-laskar saling bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat. 3) adanya perbedaan ideologi di antara mereka. Sebagai tentara nasional, Tentara Indonesia berideologi Pancasila, sedangkan MPPP yang terdiri atas berbagai badan perjuangan, memiliki ideologi berbeda-beda. 4) adanya perbedaan pola perjuangan. Pihak Tentara Indonesia lebih memilih perjuangan diplomasi, sebaliknya, para pejuang MPPP lebih memilih perjuangan fisik berkonfrontasi langsung dengan senjata. 5) faktor psikologis berupa “perang kata-kata” dimana yang satu saling menjelekan yang lainnya.

Keempat, konflik antara Tentara Indonesia dan badan perjuangan MPPP terjadi dalam dua bentuk, yaitu konflik emosional dan konflik fisik. Pada ranah konflik fisik ini, pertempuran tidak hanya terjadi antara TNI dengan Sekutu, tapi juga terjadi antara TNI dengan badan-badan perjuangan. Konflik fisik ini berawal dari kebijakan merasionalisasi berbagai macam badan perjuangan untuk

digabungkan kedalam TNI. Reaksi yang ditimbulkan beragam, dari yang semula menerima begitu saja bergabung kedalam TNI, namun tidak sedikit yang menentang kebijakan tersebut. Salah satu yang menentang kebijakan rasionalisasi adalah barisan API (Angkatan Pemuda Indonesia), Pesindo, hingga Hisbullah. Badan-badan perjuangan tersebut merupakan badan perjuangan yang dijiwai oleh partai politik, jadi kepentingan politiklah yang diutamakan. Lebih parah lagi ketika berdiri DI-TII (yang mempunyai pasukan-pasukan Hisbullah dan Fi Sabilillah) yang berada di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo, bermaksud “makar” dengan hendak mendirikan NII (Negara Islam Indonesia). Maka tidak bisa dihindarkan lagi pertempuran antara Tentara Indonesia dengan DI-TII, yang terkenal dengan pertempuran antralina pada tanggal 25 Januari 1949.

Kelima, akibat dari adanya konflik antara Tentara Indonesia dan MPPP akan menyangkut masalah politik serta pertahanan dan keamanan di Jawa Barat, khususnya Priangan. Di satu pihak, Tentara Indonesia lebih bersikap diplomatis, mereka berjuang dan bertindak sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Dipihak lain, MPPP lebih bersifat konfrontatif dan agresif. Adanya perbedaan dalam langkah-langkah perjuangan yang di ambil oleh tentara Indonesia dan MPPP, menyebabkan ketidak-kompakan dan terjadinya dualisme dalam kelompok pertahanan. Ketidak-kompakan tersebut mengakibatkan terjadinya kegagalan-kegagalan dalam melakukan strategi perjuangan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka terjadilah banyak pertumpahan darah. Bukan hanya antara pihak Bangsa Indonesia dengan Sekutu saja, namun antara kita dengan kita (perang saudara).

Gin Gin Junaedi, 2012

Konflik Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Di Jawa Barat (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu